

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Sistem politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Perubahan sistem politik dari orde baru ke orde reformasi saat ini secara langsung membawa perubahan besar dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia yang semakin kian terbuka dan transparan. Pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan. Kita telah melaksanakan pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah secara langsung, suatu ritual demokrasi dimana partisipasi rakyat dibutuhkan.

Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa, negeri ini telah sepuluh kali menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan yang terakhir tahun 2009. Namun, pada tahun 2004 telah terjadi banyak perubahan dalam sistem pemilihan umum yang digunakan. Pada pemilu tahun 2004 dan 2009, telah menggunakan sistem pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Upaya mendemokratisasikan kehidupan bernegara menghasilkan suatu kemajuan yang signifikan, yaitu dengan diubahnya sistem pemilihan

presiden dan wakil presiden dari sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan ini merupakan suatu kemajuan proses demokrasi dan membuat ruang yang lebih luas bagi partisipasi aktif warganegara. Perubahan ini berimbas ke sistem politik lokal, yakni pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Di Indonesia, pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kenegaraan. Melalui pemilihan umum pula rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan struktur pemerintahan. Sistem pemilihan di Indonesia sendiri juga berlaku dengan menggunakan hak rakyat untuk memilih presiden hingga kepala daerah yang di mana semua itu telah kita laksanakan sembilan tahun lalu.

Peningkatan pemilihan umum yang berkualitas baik dapat diukur dari tingkat partisipasi pemilih dan rendahnya golput. Oleh karena itu, untuk menarik minat masyarakat di laksanakan suatu kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu yang disebut dengan Kampanye pemilu. Kampanye pemilu merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada tahap sebelum pemungutan suara serta mempunyai sasaran utama yang tepat.

Sasaran utama dari kampanye yakni masyarakat yang memiliki hak pilih. Keikutsertaan pemilih dalam mengikuti kampanye diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan sikap positif terhadap pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan. Sikap positif terhadap pelaksanaan pemilihan umum dapat ditunjukkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pemilu. Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti

pemilihan umum dapat dilakukan dengan cara menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakil rakyat.

Untuk menarik minat masyarakat, para tim sukses dari suatu kandidat peserta pemilu menggunakan berbagai strategi dan pola kampanye untuk pemenangan calon-calon kandidat pemilu. Pola kampanye yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan cara memasang spanduk-spanduk ditempat umum yang mudah dilihat oleh pemilih, orasi didepan para pemilih atau juga dapat dilakukan *door to door* kerumah warga untuk mensosialisasikan visi misi dari para kontestan pemilu sehingga pemilih lebih berkesan karena telah merasa diperhatikan oleh kontestan pemilu.

Pemilihan umum sejatinya harus menjadi penyalur aspirasi masyarakat wajib pilih untuk menentukan siapa pemimpin yang dipercayainya bisa membawa aspirasi dan harapan mereka yang lebih baik dimasa akan datang. Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak memberikan suaranya dalam pemilu. Adapun pemilu yang berkualitas baik dapat diukur dari tingkat partisipasi pemilih dan rendahnya golput.

Berdasarkan hasil pra riset yang penulis lakukan, menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Penurunan partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya, alasan teknis, ekonomis, pesimis, kurangnya kesadaran, dan alasan karena tidak ada di tempat. Seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran

No.	Nama Dusun	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Jumlah Golput
1	Dusun I	103	87	16
2	Dusun II	157	128	29
3	Dusun III	122	112	10
		382	327	55

Sumber: Data administratif Kantor Kepala Desa Purworejo Tahun 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan politik, serta tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilu hal ini dikarenakan lemahnya sosialisasi pola kampanye yang diterapkan di desa Negeri Katon oleh tim sukses dari para kandidat peserta pemilu. Sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Bedasarkan hasil wawancara terhadap kepala desa setempat, penyebab masyarakat tidak ikut serta dalam pemilihan, faktor pemicunya antara lain tingginya tingkat penurunan partisipasi politik masyarakat di kecamatan Purworejo disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya, alasan teknis, ekonomis, apatis dan pesimis, idealis, kurangnya kesadaran, dan alasan tidak berada di tempat. Alasan teknis terjadi karena pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), alasan ekonomis biasanya alasan oleh masyarakat yang berada pada status pekerjaan lebih rendah yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, alasan apatis dan pesimis dikarenakan sikap acuh tak acuh, tidak percaya dan dikarenakan pemilih bingung untuk memilih siapa dalam pemilu, alasan idealis dengan memilih golput karena bosan dengan janji-janji para calon yang dianggap muluk-muluk, serta karena seringnya dan pelaksanaan pemilu yang berdekatan waktu pelaksanaannya, kurangnya kesadaran masyarakat karena masih rendahnya pendidikan politik masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu apa manfaat dan tujuan Pemilu dan terakhir faktor seperti kuliah/bekerja di luar kota.

Kampanye merupakan jembatan untuk menarik perhatian masyarakat dalam rangka partisipasi politik dalam pemilihan umum. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan melihat jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, atas dasar inilah peneliti ingin meneliti pengaruh kampanye terhadap sikap politik masyarakat desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan umum sebagai penyalur aspirasi masyarakat
2. Pola kampanye dalam meraih simpati masyarakat
3. Pengaruh kampanye terhadap sikap politik masyarakat
4. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum
5. Penyebab masyarakat tidak ikut serta dalam pemilu (golput)

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu pengaruh pola kampanye terhadap sikap politik masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “adakah pengaruh pola kampanye terhadap sikap politik masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pola kampanye terhadap sikap politik masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.6 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan wilayah kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan demokrasi, karena berkaitan dengan kampanye dan pemilihan umum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk:

- Masyarakat agar lebih peduli dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- Para peserta calon kandidat agar dapat menyelenggarakan kampanye dengan baik.

1.7 Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya dengan wilayah kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan politik dan demokrasi yang membahas pengaruh pola kampanye terhadap sikap politik masyarakat.

b. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjeknya adalah masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

c. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objeknya adalah pengaruh pola kampanye terhadap sikap politik masyarakat.

d. Ruang Lingkup Tempat

Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

e. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan tanggal 11 Januari 2013 setelah terbitnya surat izin penelitian sampai dengan selesai.